

SKRIPSI

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)



Oleh

SELLY OKTAVIANI

NIM B111 13 602

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)**

OLEH :

SELLY OKTAVIANI

B111 13 557

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)**

Disusun dan Diajukan oleh:

SELLY OKTAVIANI

B111 13 602

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 1 Maret 2017
Dan Dinyatakan Diterima

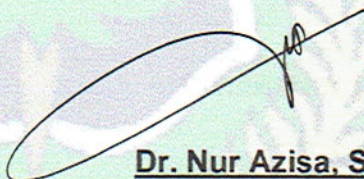
Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 1963 1024 1989 031 002

Sekretaris,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967 1010 1992 022 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Selly Oktaviani

Nomor Pokok : B 111 13 602

Bagian : Hukum Pidana

Judul Proposal : Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan
Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang
Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres
Bone)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

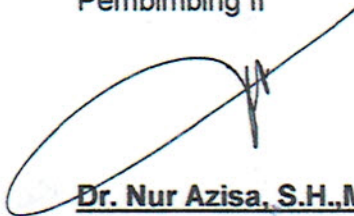
Makassar, Januari 2017

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 1963 1024 1989 031 002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP.1967 1010 1992 022 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

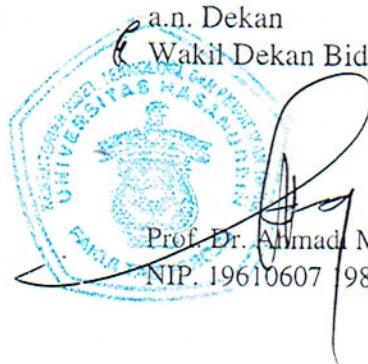
Nama	: SELLY OKTAVIANI
Nomor Pokok	: B11113602
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

SELLY OKTAVIANI (B111 13 602) Dengan Judul “**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)**” Dibimbing Oleh **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di kota Watampone kabupaten Bone tepatnya di Polres Bone dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watapone (BAPAS) membahas tentang peranan dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam menerapkan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak. Dimana BAPAS menjadi salah satu unsure penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak dan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan melalui *Restorative Justice*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Bone dan BAPAS peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan Diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk Diversi tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah

Puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan salam dan shalawat kepada junjungan dan panutan kita Rasulullah SAW. yang telah memperkenalkan kita kepada Islam agama “*rahmatanlilalamin*”.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda, H. Muh. Tahir dan Ibunda Hj. Saharia yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan

semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras, selalu bertawakkal, menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kepada saudara Penulis, Mahdea Tahir terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Bapak Dr. Andi Syasuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing II.
4. Kepada tim penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, secara khusus Departemen Hukum Pidana serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

6. Kepala Polres Bone dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone beserta seluruh staf atas waktu dan kerjasama yang telah diberikan selama Penulis melakukan penelitian.
7. Arlin Joemka Saputra, S.H. Nursoerya Sulaiman, S.E dan Andi Nurul Fadillah sebagai teman yang selalu berbaik hati mengarahkan dan memberi masukan sejak awal dan selama penyusunan skripsi ini.
8. Saudariku CSH, MH, dan MKn. Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, S.H., Sri Rezky Radeng, S.H dan Nurindah Eka Fitriani atas kesabaran dan kesetiaan yang tidak pernah berubah semenjak semester 1 hingga pada masa akhir studi S1. Semoga tetap bersama dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita yang telah kita harapkan bersama.
9. Saudaraku “Sembilan9 Keajaiban Dunia” (Faiz Adani, Febri Maulana, Nelson Mendila, Nisrina Atikah, Nurindah Eka Fitriani, Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, S.H dan Sri Rezky Radeng, S.H). “Magang Geng’s” (Andi Atira Bunyamin, S.H. Andi Helsa, Andi Helga, Dhania Soraya, Inzani, Khaiffah Khairunnisa, Lisa Nursyahbani, S.H. Mey Fatika Sari, S.H. Muhammad Raihan H, Nurindah Eka Fitriani, Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, S.H. Sri Rezky Radeng, S.H. Titis Denisa, S.H. Ulfa Aalyah Usman, Yogi Pratama). “Ius Civitatis’13” (Ahmad Suryadi, Akbar Yadi, Andi Adenalta, Andi Nurul Fadillah, Asriani, Antho, Andi Batara, Dian Dumbi, Dian Juliarsih, Hery, Mardis Awaluddin, Muhammad Saiful Fachri, Mita

Baranti Subakti), “The Success Girls” (Indry Priyandini Basri, S.ked. Khetline Yessica Nalle, S.I.kom dan Nurul Andriyati, S.ked) atas doa, motivasi, semangat, bantuan yang begitu banyak, dan waktu yang selalu ada untuk Penulis.

10. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK), Asian Law Students Association (ALSA), Lembaga Kajian Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (LKMP), selaku organisasi dan komunitas tempat penulis berproses dan bertransformasi hingga saat ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2013 FH-UH ASAS (Aktualisasi Solidaritas Mahasiswa yang Adil dan Solutif).
12. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan semua pembaca skripsi ini umumnya.

Makassar, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	6
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian	8
1. Pengertian Pencurian	8
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	10
C. Restorative Justice	17
1. Pengertian Restorative Justice	17
2. Pelaksanaan Restorative Justice Di Indonesia	17
3. Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice.....	26
D. Diversi	28
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	34
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	34
2. Pengertian Anak.....	36
3. Hak Anak Dalam Proses Peradilan.....	39
4. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak.....	39
F. Balai Pemasyarakatan	46
1. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	49

2. Peran Balai Pemasyarakatan	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	57
B. Jenis dan Sumber Data.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Bone	59
B. .Kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Bone	68

PENUTUP	71
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi Anak.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat memengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Pasal 45 KUHPidana, mendefinisikan Anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu

hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997.¹

Kurang lebih empat ribu Anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas suatu kejahatan ringan. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, mereka akan dijebloskan kedalam penjara atau rumah tahanan. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena banyak Anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di penahanan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Melihat prinsip tentang perlindungan Anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap Anak, termasuk Anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem peradilan Anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara Anak diluar mekanisme pidana konvensional yaitu *Restorative Justice*.

Konsep *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-

¹Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti., Jakarta Hal 2-3

sama berbicara. *Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi Anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian (Pasal 362 KUHPidana).²

Dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasyarakatan melalui petugas pembimbing pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam undang-undang pengadilan Anak. Melalui undang-undang sistem pengadilan pidana Anak ini, BAPAS menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak dan dalam Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan (Diversi) melalui *Restorative Justice*. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat judul **“Peranan Pembimbing Kemasyarakatan**

²Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Revika Aditama, Hal 180.

dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Bone?
2. Kendala apakah yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Bone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Bone.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana(*Strafbaar Feit*)

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴

³ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo., Jakarta, hal 69.

⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hal 91.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan.⁵

Simons dalam Roni Wiyantomendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*); dan
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶

Sedangkan menurut Pompe *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

⁵ *Ibid.*

⁶Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.MandarMaju.Bandung, Hal.160.

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁷

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Karena itu perlu diberikan pengertian pencurian dan jenis – jenis pencurian dalam KUHPidana berikut ini:

1. Pengertian Pencurian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengomentari Pasal 362 KUHPidana sebagai berikut:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain; dan

⁷P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta. Hal. 108.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁸

Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri;
- b. Unsur suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa;
- c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, misalnya si A bersama si B membeli sebuah buku sehingga menjadi kepunyaan si A dan si B, kemudian disimpan di rumah si B tanpa

⁸ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*. Bogor. Hal. 249.

sepengetahuan si A, buku tersebut dicari oleh si A. hal ini menunjukkan si B telah mencuri sebagian dari barang milik si A, meskipun barang itu milik bersama; dan

- d. Unsur pengambilan, dalam hal ini pengambilan harus sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Adapun seseorang yang karena keliru mengambil barang orang lain, hal ini belum dapat dikategorikan pencurian. Apabila seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, dan sudah ada maksud untuk memiliki hal tersebut, hal semacam ini sudah masuk pencurian. Jika pada waktu ia mengambil barang itu terlintas difikirannya untuk menyerahkan kepada polisi, kemudian disimpan dan belum diserahkan pada polisi, maka hal ini sudah termasuk menggelapkan (Pasal 372 KUHPidana), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada dalam kekuasaannya atau berada di tangannya atau di tempatnya.⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHPidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

⁹*Ibid.*, hal. 250.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUHPidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke-1. Pencurian ternak (KUHPidana 101);
Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;
Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. (KUHPidanaPasal 98, Pasal 167, dan Pasal 365);
Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (KUHPidanaPasal364); dan
Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. (KUHPidanaPasal 99, dan Pasal 364)
- 2) Jika pencuri yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut dalam ke-4 dan ke-5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHPidanaPasal 35, Pasal366, dan Pasal 486)¹⁰

Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana disebut “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.¹¹

a. Pencurian hewan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 250-251.

¹¹ Andi Siti Asma. 2014. *Skripsi “Tijauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks).* hal 15.

Menurut R. Soesilo yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, sebagai berikut:

“Bila barang yang dicuri adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi, Anjing, Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.”¹²

Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan. Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.¹³

b. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa:

“Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang

¹² R. Soesilo. *Op.cit.* hal. 251.

¹³ Andi Siti Asma. *Op.cit.* hal. 16.

yang adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota ada terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.”¹⁴

Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.¹⁵

c. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut :

“Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang – malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam diperlukan sebagai kediaman masuk sebutan rumah, pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kehilatannya nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui

¹⁴ R. Soesilo. *Op.cit.* hal 251.

¹⁵ Andi Siti Asma. *Op.cit.* hal 17.

jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk disini.”¹⁶

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut. Sedang yang dilakukan diluar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat di klasifikasian sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.¹⁷

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo bahwa:

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55). Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).¹⁸

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat

¹⁶R. Soesilo. *Op.cit.* hal 251.

¹⁷ Andi Siti Asma. *Op.cit.* hal.17-18.

¹⁸ R. Soesilo. *Op.cit.* hal. 251-252.

dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.¹⁹

e. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.

Pencurian tersebut diatas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya, 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain-lain. Disini harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk dalam pengertian membongkar. 'Memecah', sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. 'Memanjat', lihat Pasal 99. 'Anak kunci palsu', lihat Pasal 100. 'Perintah Palsu'. Sama dengan sesuatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak sebagai tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu

¹⁹ Andi Siti Asma. *Op.cit.* hal. 18.

dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat itu adalah palsu. 'Pakaian jabatan palsu' (valsch costuum), sama dengan kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura sebagai polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.²⁰

Mencermati uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adalah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan lainnya. Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Pengrusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan Anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.²¹

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai *delik gegualificeerd*, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Hal

²⁰ R. Soesilo. *Op.cit.* hal. 252.

²¹ Andi Siti Asma. *Op.cit.* hal.19-20.

yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy sebagai berikut:

Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara dalam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya pada Pasal 362 KUHPidanamengenai pencurian biasa dan Pasal 363 mengenai pencurian berat. Yang dikualifikasikan dala Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adalah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.²²

C. Restorative Justice

a. Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restorative)

Restorative Justice atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.²³

b. Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Indonesia

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan *Pilot Unicef* tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003.

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap

²²Effendy, Rusli. 1993. *Asas Hukum Pidana Bagian 2*. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin. Hal. 5-6.

²³Pasal 1 Angka 6 UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.

Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pengadilan negeri ibaratnya adalah muara, yang menerima dan mengadili perkara-perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan negeri. Dari daftar perkara pidana Anak pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung selama 1 tahun terakhir (Januari 2004-Mei 2005) tercatat selama 70 (tujuh puluh) perkara Anak, yang usianya berkisar antara 13 (tiga belas)

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang pada saat perkara dilimpahkan hampir semua terdakwa berada di dalam tahanan.²⁴

Sejalan dengan tujuan *Restorative Justice*, Pengadilan Negeri Bandung telah membuat ruang sidang dan ruang tunggu khusus Anak dan memisahkan terdakwa Anak yang di tahan dari terdakwa dewasa sejak saat yang bersangkutan tiba dari rutan.

Terdakwa Anak yang menunggu waktu persidangan ditempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya dan atau petugas Bapas dan di ruangan itu disediakan pula buku-buku bacaan Anak-Anak dan remaja yang merupakan sumbangan dari *Unicef* (*United Nation Children and Education Fund*).

Ruang sidang Anak itu sendiri, tempat bagi terdakwa Anak, sengaja tidak diberi tulisan “terdakwa” dengan pertimbangan psikologis si Anak agar merasa aman, bebas, dan tidak merasa dipermalukan selama menjalankan persidangan.

Selanjutnya dalam hal penutupan pidana dari jaksa penuntut umum, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa Anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya sesuai/pas dengan lamanya terdakwa Anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah UU agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka

²⁴ Dr. Marlina, *Op.cit.* hal 203-204

putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa Anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara Anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum; dan
4. Orang tua/wali Anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak tersebut secara lebih baik.²⁵

Sistem peradilan pidana Anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksanaannya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip "*the best interest of the children*".

²⁵*Ibid.* hal 205

Hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* di Bandung. Pertama aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang dilakukan, polisi berusaha untuk menyelidiki kasusnya guna melimpahkan perkara ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan semestinya dilakukan sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan pada penanganan kasus Anak.

Hambatan kedua yang dihadapi oleh penuntut umum, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntukan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan konsep *Restorative Justice* tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksanaan peradilan pidana Anak. Artinya pemahaman yang

sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana Anak.²⁶

Karakteristik pelaksanaan *Restorative Justice* di Bandung:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk berkerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik *Restorative Justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative Justice*, yaitu:

²⁶*Ibid.*, hal. 206.

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *Restorative Justice* adalah:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Kenakanalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; dan
3. Kenakalan Anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat di selesaikan dengan *Restorative Justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *Restorative Justice* adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah

melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku) dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *Restorative Justice* (musyawarah pemulihan) adalah :

1. *Korban dan keluarga korban.* Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *Restorative Justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.
2. *Pelaku dan keluarganya.* Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga

dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. *Wakil masyarakat.* Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri). Memperhatikan keseimbangan gender agar aspirasi perempuan senantiasa terwakili dalam pengambilan keputusan.

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat rukun warga (RW) di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (tempat kejadian perkara/TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hal. 205-208.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah *Restorative Justice* yang diambil adalah:

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau *community service order* berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai fasilitator.²⁸

c. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *Restorative Justice* di berbagai Negara menunjukkan beberapa keberhasilan. Beberapa Negara telah melaksanakan dan berhasil dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan memakai bentuk-bentuk yang sesuai dan mempunyai akar di Negara masing-masing. Namun, disamping keberhasilan berbagai Negara dalam pelaksanaan

²⁸*Ibid* hal 208-209

konsep *Restorative Justice* didapati juga hambatan atau tantangan dalam pelaksanaannya di berbagai Negara tersebut.

Hambatan yang dialami oleh beberapa Negara dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh Anak. Kebanyakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Anak di Negara Canada akan dikembalikan ke peradilan formal untuk mendapatkan hukuman penjara. Untuk tipe pelaku tertentu *Restorative Justice* bukan merupakan pilihan yang tepat, karena tidak semua atau ada beberapa tindak pidana serius atau pelaku tertentu yang harus diasingkan dari lingkungan dengan alasan keamanan umum. Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku Anak setelah menjalani proses *Restorative Justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.

Terjadinya *re-offending* terhadap Anak pelaku setelah menjalankan *Restorative Justice* membuat Anak harus menjalani proses peradilan formal kembali. Kegagalan *Restorative Justice* dikarenakan gagalnya pelaksanaan kesepakatan restitusi oleh pelaku.

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh

karena itu, peran pelaksana *Restorative Justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana dan diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga Anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan.²⁹

Tanpa sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *Restorative Justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.³⁰

D. Diversi

1. Definisi dan Tujuan Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, dimana dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7

²⁹*Ibid*, hal 229

³⁰*Ibid*, hal. 230.

(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (lihat Pasal 7 UU.12 Tahun 2012 Tentang SPPA).

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative. Dalam hal musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Selain itu proses Diversi wajib memperhatikan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA:

- b. Kepentingan korban;
- c. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- d. Penghindaran stigma negative;
- e. Penghindaran pembalasan;
- f. Keharmonisan masyarakat; dan
- g. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan (Pasal 9 UU SPPA):

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Dalam setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan harus selalu diupayakan yang namanya Diversi. Dimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyidikan (Pasal 29 UU SPPA)
 - 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
 - 2) Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi
 - 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
 - 4) Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan
- b. Penuntutan (Pasal 42 UU SPPA)
 - 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7(tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik
 - 2) Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntu Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
 - 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan
- c. Pemeriksaan (Pasal 52 UU SPPA)
 - 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum
 - 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim
 - 3) Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri
 - 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan

- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke persidangan

2. Kewenangan Diversi

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Syarat Diversi

Dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai kewenangan diversi. Pasal 8 menentukan syarat Diversi sebagai berikut:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan

- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya Pasal 9 menentukan syarat Diversi sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur Anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

4. Beberapa Teori Pidanaan Yang Terkait Dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan.

Tujuan pidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:³¹

- a. Teori absolute (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pidanaan sebagai

³¹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Revika Aditama., Bandung. Hal. 141-144.

pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.

b. Teori relative (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:

1) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa

2) Memperbaiki pribadi terpidana dalam melakukan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna

c. Teori gabungan/modern (*vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan

yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.

- c. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- d. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan Anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.³²

³² Setya Wahyudi, 2011. *Iplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing., Yogyakarta.hal.26.

Didalam kata sistem peradilan pidana Anak terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah Anak. Kata “Anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, apabila mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang di maksud Anak adalah Anak nakal, yakni Anak yang melakukan tindak pidana, ataupun Anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi Anak.

Sistem peradilan pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana Anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.³³

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁴

Menurut Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang

³³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika., Jakarta Timur. Hal. 44.

³⁴ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang. Hal. 4.

menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁵

2. Pengertian Anak

Menurut Kamus Hukum, Anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Hukum Pidana Luar Kodifikasi).³⁶

Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara Anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian Anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, Anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si Anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si Anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si Anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

³⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta., Bandung. hal.14.

³⁶ M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”*. Surabaya. Hal. 41.

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai Anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian Anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak Anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian Anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi Anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan Anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian Anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak Anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak Anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan Anak;

- c. Rehabilitasi, yaitu Anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan Anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan; dan
- e. Hak Anak-Anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHPidana maka Anak didefinisikan sebagai Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu jika Anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.³⁷

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁸

3. Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

³⁷ Andi Lesmana, *Definisi Anak*, Web. 5 Oktober 2016.

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *op.cit.* hal 4.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

4. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perspektif peradilan pidana Anak, substansi dalam sistem peradilan pidana Anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap Anak sebagai kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Secara rinci dapat diuraikan berikut ini:

1. Petugas Pemasyarakatan

³⁹*Ibid.*, Pasal 3.

Dalam bab IV tentang petugas pemasyarakatan dalam UU pengadilan Anak, Pasal 33 merumuskan bahwa petugas pemasyarakatan terdiri dari:

A. Pembimbing kemasyarakatan dari departemen kehakiman; Ditinjau dari aspek yuridis, pembimbing kemasyarakatan tersebut adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan. Sedangkan pengertian balai pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yakni seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan seperti yang ditunjuk dalam Pasal 33 huruf a UU Pengadilan Anak, mempunyai tugas:

1. Membantu Memperlancar Tugas:
 - a) Penyidik;
 - b) Penuntut umum
 - c) Hakim (Dalam perkara Anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang Anak)
 - d) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi:
 - a) Pidana bersyarat;
 - b) Pidana pengawasan;
 - c) Pidana denda;
 - d) Diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau
 - e) Anak yang memperoleh pembebasan/pelepasan bersyarat dari lembaga permasyarakatan.

B. Pekerja sosial dari departemen sosial; Petugas khusus dari departemen sosial yang mempunyai keahlian khusus dari departemen sosial yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Dimensi kedua dari petugas pemasyarakatan ini, sejak departemen sosial dihilangkan, maka tugas dan kewajiban diambil alih oleh pekerja sosial mantan pegawai departemen sosial yang melebur ke departemen lain dalam melaksanakan fungsi sosial. Bidang kegiatannya adalah meliputi:⁴⁰

1. Pendidikan, meliputi:

⁴⁰Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta.hal.109.

- a) Mengikuti pendidikan formil dan mencapai gelar/ijazah; dan
- b) Mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan dan mendapat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
- 2. Kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a) Melaksanakan penerimaan calon penerima pelayanan;
 - b) Melaksanakan pelayanan bagi penerima pelayanan; dan
 - c) Melaksanakan resosialisasi.
- 3. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a) Menentukan potensi, sumber kebutuhan dan permasalahan lembaga kesejahteraan sosial;
 - b) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial, kesatuan masyarakat dalam satuan lingkungan/wilayah tertentu;
 - c) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan lanjut;
 - d) Melaksanakan tugas pengembangan kebijaksanaan sosial dan perencanaan kesejahteraan sosial; dan
 - e) Melaksanakan pengembangan tenaga kerja sosial
- 4. Pengembangan profesi pekerja sosial, meliputi kegiatan:
 - a) Melakukan kegiatan/karya ilmiah; dan
 - b) Membuat/menulis karya tulis di bidang kesejahteraan sosial hasil penggalan sendiri.
- 5. Pendukung pekerjaan sosial, meliputi:
 - a) Pengabdian masyarakat;
 - b) Peran serta dalam kegiatan pendidikan dan latihan;
 - c) Keanggotaan dalam organisasi/panitia;
 - d) Menerjemahkan buku di bidang kesejahteraan sosial;
 - e) Memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 - f) Menilai pejabat pekerja sosial

2. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan; Dimensi ketiga dari petugas kemasyarakatan adalah pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan yaitu organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap masalah

Anak nakal. Pekerja sosial sukarela adalah orang yang harus mempunyai:

1. Keahlian khusus atau keterampilan khusus; dan
2. Minat untuk membina, membimbing dan membantu Anak demi kelangsungan hidup dan perlindungan terhadap Anak.

Selain itu, pekerja sosial sukarela memberikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil:

- 1) Bimbingan;
- 2) Bantuan;
- 3) Pembinaan terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan
- 4) Penyidik Anak; Penyidik khusus dalam sidang Anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian RI.

Untuk menjadi penyidik Anak, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; dan
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak

Bila memperhatikan dokumen internasional memang diakui bahwa dalam kontak awal antara seorang Anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/penyidikan, sangat memperhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi pengaturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang Anak, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana.

- 5) Penuntut Umum Anak; diakuinya penuntut umum khusus Anak yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.

Untuk menjadi penuntut umum Anak, harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
- 6) Hakim Anak; hakim yang khusus ditetapkan sebagai hakim Anak, baik ditingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat kedua (pengadilan tinggi), dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

1) Hakim Anak; pada tingkat pertama, hakim Anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Untuk menjadi hakim Anak, harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.

Didalam melaksanakan tugasnya, hakim Anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti.

2) Hakim Banding Anak; sementara pengaturan hakim pada tingkat kedua, ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk menjadi hakim banding Anak, harus memenuhi syarat-syarat yang sama untuk keberlakuan hakim Anak tingkat pertama, yaitu:

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan peradilan umum; dan
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.

Di dalam melaksanakan tugasnya, hakim Anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti.

3) Hakim Kasasi Anak

Untuk menjadi hakim kasasi Anak, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan lingkungan peradilan umum; dan
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
3. Didalam melaksanakan tugasnya, hakim Anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti.

7) Penasihat Hukum Anak; bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada terdakwa/tersangka dalam bentuk penasihat hukum. Setiap Anak sejak ditetapkan atau ditahan, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan ini diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum, atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya mengenai memperoleh bantuan hukum. Bahwa dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa Anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya terhadap Anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam

undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam prakti. Artinya, dengan kehadiran penasihat hukum diharapkan terjaminnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa Anak dalam suasana kekeluargaan.

F. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan *Reclassering* yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan Anak-Anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan *Reclassering* ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP Anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan Anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani Anak sipil. Petugas *Reclassering* disebut *Ambtenaar de*

Reclassering. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.

Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai

BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini.

a. Dasar Hukum menurut UU No.11 Tahun 2012

Balai pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsure penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan.

Dimana dalam Undang-undang Tahun 2012 diatur mengenai yang termasuk Petugas Kemasyarakatan (Pasal 63), syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64), tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 65).⁴¹

b. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan

Visi

⁴¹ Bapas Surakarta. *Sejarah Balai Pemasyarakatan*, 2013. 4 Juni 2014.Web. 5 Oktober 2016

Menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat

Misi

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
2. Memberikan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan
3. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan
4. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

1. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b) Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana

pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan Anak-Anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
5. Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa "pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum."

Fungsi peradilan Anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan Anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan Anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁴²

2. Peran Balai Pemasyarakatan Pada Perlindungan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk Anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap Anak

⁴²Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung.hal. 92.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik Anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi Anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- b. Membimbing, membantu dan mengurus Anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga Pemasyarakatan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Adapun tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persingan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenal tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi,

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Untuk bisa diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal 64 ayat (2) menentukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah diploma 3 (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan
 - a) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - b) Sekolah menengah umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b
4. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang pelayanan dan
5. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.⁴³

⁴³ M.Nasir Djamil, *op.cit.*, hal. 169-170.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor wilayah hukum Polres Bone dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan domisili penulis dan juga keluarga, yang Insha Allah dapat membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data empiric yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Penyidik kasus Anak
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature, hasil kajian melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, yang pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara

pengamatan langsung objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara Penyidik kasus Anak.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Bone

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁴ Dimana dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap

⁴⁴Pasal 1 Angka 6 UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum tentu sangat berkaitan dengan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁴⁵ *Restorative Justice* dan Diversi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua hal ini sangat saling berhubungan satu sama lain.

Dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping terhadap Anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana Anak yang dilakukan atau diupayakan secara Diversi dengan penerapan *Restorative Justice*. Adapun proses peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara Anak secara Diversi dengan penerapan *Restorative Justice* sebagai berikut :

1. Balai Pemasyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.

⁴⁵Pasal 1 Angka 7 UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Setelah surat pihak penyidik telah diterima maka kepala Balai Pemasyarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada pihak Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dimana dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan
5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini berisi:
 - a. Identitas klien
 - b. Identitas orang tua klien
 - c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien seperti:
 - 1) Jenis tindak pidana
 - 2) Latar belakang melakukan tindak pidana
 - 3) Kronologis terjadinya tindak pidana
 - 4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
 - d. Riwayat hidup klien seperti:

- 1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan
 - 2) Riwayat kesehatan klien
 - 3) Riwayat pendidikan klien
 - 4) Riwayat pekerjaan klien
 - 5) Riwayat pelanggaran hukum klien
- e. Kondisi keluarga klien
- 1) Riwayat pernikahan orang tua
 - 2) Pola pengasuhan orang tua
 - 3) Relasi sosial dalam keluarga klien
 - 4) Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat
 - 5) Keadaan sosial ekonomi keluarga
 - 6) Keadaan rumah orang tua klien
- f. Kondisi lingkungan setempat seperti :
- 1) Keadaan geografis
 - 2) Mata pencarian penduduk
 - 3) Tingkat pendidikan kemasyarakatan
 - 4) Keadaan sosial
 - 5) Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat
 - 6) Fasilitas sosial dan umum
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
- 1) Tanggapan/sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalannya
 - 2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap

kesalahannya

- 3) Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.

h. Kebutuhan klien

i. Pandangan masa depan klien

j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya

k. Analisa masalah klien

l. Kesimpulan dan rekomendasi.

6. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3 x 24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik. (Pasal 28 UU No.11 Tahun 2012)

7. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik

8. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut dan syarat-syarat dari untuk dilakukannya Diversi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012) maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum maka pihak penyidik harus melakukan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

9. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya Diversi maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan Diversi tersebut.
10. Pihak penyidik dan Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara Diversi.
11. Namun sebelum diversi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
12. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara Diversi
13. Selain Pembimbing Kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya Diversi

14. Ketika Diversi dilakukan, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional serta proses Diversi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan *Restorative Justice* (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012)
15. Ketika Diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada Diversi tersebut. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara Diversi

Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan apabila proses Diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan. Namun proses Diversi tersebut tetap dilakukan ditingkat penuntutan maupun pemeriksaan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Namun proses Diversi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada Diversi di setiap tahapan tersebut.

Sejak berlakunya Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sejak tahun 2014 sampai saat ini (Desember 2016) jumlah kasus Anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Polres Bone yakni sebagai berikut :

(Tabel 1)
Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian di Polres Bone.

NO	TAHUN	JTP	PTP(DIVERSI)	KET
1	2014	13	10	-
2	2015	15	16	-
3	2016	10	14	-
JUMLAH		38	40	-

Keterangan :

Sumber Data = Polres Bone

Ket : JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP= Penyelesaian Tindak Pidana

1. Pada tahun 2014 Jumlah Tindak Pidana (JTP) anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bone berjumlah 13 kasus, namun pada tahun tersebut Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) hanya 10 kasus, jadi masih ada 3 kasus yang belum diselesaikan oleh Polres Bone pada tahun 2014.
2. Pada tahun 2015 JTP anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bone berjumlah 15 kasus dan PTP berjumlah 16kasus. Pada tahun 2015 ada 16 kasus PTP karena, masih ada 1 kasus yang diselesaikan oleh Polres Bone pada tahun 2014 ke tahun 2015.

3. Pada tahun 2016 JTP anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bone berjumlah 10 kasus dan PTP pada tahun 2016 sebanyak 14 kasus karena, masih ada kasus yang ditangani oleh Polres Bone pada tahun 2014 ke tahun 2016.

Berdasarkan hasil data diatas semua kasus Anak yang berkonflik dengan hukum untuk tindak pidana pencurian sejak tahun 2014 – 2016 semua dilakukan secara Diversi.

(Tabel 2)

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone:

NO	PERKARA/PASAL	2014	2015	2016	KET
1.	362 KUHPidana	6	3	4	-
2.	363 KUHPidana	19	13	22	-

Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.

Adapun tindak pidana berdasarkan KUHPidana yang terjadi di Watampone sebagai berikut :

1.Pasal 362 KUHPidana menjelaskan “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-- “

Untuk tahun 2014 terdapat 6 kasus, tahun 2015 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus. Untuk Pasal 362 KUHPidana diselesaikan secara Diversi.

2. Pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHPidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak (KUHPidana 101);

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. (KUHPidana Pasal 98, Pasal 167, dan Pasal 365);

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (KUHPidana Pasal 364); dan

Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. (KUHPidana Pasal 99, dan Pasal 364)

(3) Jika pencuri yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut dalam ke-4 dan ke-5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHPidana Pasal 35, Pasal 366, dan Pasal 486).

Untuk tahun 2014 terdapat 19 kasus, tahun 2015 terdapat 13 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 22 kasus. Untuk Pasal 363 KUHPidana diselesaikan secara tidak Diversi karena hukuman pada Pasal tersebut selama-lamanya 7 (tujuh tahun) dan termasuk pengulangan tindak pidana.

B. Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dimana penyelesaian tersebut dilakukan secara Diversi dengan penerapan *Restorative Justice* tentu tidak selalu berjalan dengan baik atau dengan kata lain upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan gagal. Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana Anak yang berhadapan dengan hukum dilanjutkan sampai ke tahap peradilan Anak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara,

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan para pihak

dinilai kurang aktif ataupun kurang terlibat. Dimana para pihak ketika telah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan Diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk Diversi tersebut, dimana pihak bersangkutan tersebut yaitu ; Hakim, Penyidik, Penuntut Umum, dan keluarga korban. Ketidakhadiran para pihak khususnya keluarga korban dalam penyelesaian perkara melalui proses diversi seakan mengisyaratkan bahwa pihak korban tidak ingin memilih jalan diversi melainkan pihak korban merasa lebih puas ketika tersangka dijatuhi hukuman ketika dijatuhi putusan oleh hakim di persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan harusnya yang memberikan pemahaman kepada pihak korban untuk melalui proses diversi.

2. Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban

Pada proses diversi yang menjadi aktor utama ialah para pihak korban. Pihak korban sejak dari awal ingin mempidanakan pelaku, sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya Diversi tersebut dengan alasan apapun. Padahal tidak seorang pun yang berhak untuk mencegah proses Diversi sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana dimana pelaku yang mendapatkan hukuman dibawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana berhak untuk melalui proses Diversi. Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya melakukan

proses diversi yang tidak diketahui oleh banyak orang khususnya di wilayah kabupaten Watampone. Pembimbing kemasyarakatanlah yang kemudian bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan mengenai peran penting pembimbing kemasyarakatan.

3. Permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi

Kendala selanjutnya yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku ialah adanya permintaan ganti rugi yang memberatkan bagi pihak pelaku. Sehingga apabila ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka korban tidak ingin melakukan Diversi. Ketidaksanggupan untuk memberikan ganti rugi dari pihak tersangka yang kemudian membuat penyelesaian kasus biasanya banyak diselesaikan melalui peradilan biasa melalui diversi. Kendala seperti ini yang banyak membuat pembimbing kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan kasus melalui proses diversi.

4. Letak geografis kabupaten Watampone yang sangat luas

Wilayah Balai Pemasyarakatan sangat luas meliputi 5 kabupaten yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Sinjai, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terkendala oleh transportasi dan infrastruktur yang terbatas, seperti pada kondisi wilayah yang terpencil mengakibatkan kendaraan roda

dua sulit untuk digunakan untuk mendatangi lokasi sehingga tidak jarang Pembimbing Kemasyarakatan berjalan kaki dan menggunakan perahu untuk melintasi pulau. Menurut Soejono Sukanto salah satu hal yang mempengaruhi penegakan hukum ialah sarana yang tidak mendukung. Seharusnya pemerintah memberikan sarana yang layak dan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang pihaknya tinggal di daerah terpencil.

5. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia

Kendala selanjutnya ialah kendala yang datang dari pihak pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang disebabkan masih banyak Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga belum memahami tentang pelaksanaan *Restorative Justice* untuk pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun berbagai kendala yang dihadapi sesuai dengan penjelasan diatas namun semua kasus tindak pidana pencurian oleh Anak berhasil diselesaikan secara Diversi dengan penerapan *Restorative Justice*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana Anak yang berkonflik dengan hukum. Dimulai dari tahapan pembuatan data hasil penelitian Anak yang berkonflik dengan hukum hingga penyelesaian diversi dengan prinsip *Restorative Justice*.
2. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan yakni bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri, minimnya fasilitas yang dimiliki oleh BAPAS dan sumber daya manusia Pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Meskipun ada kendala tersebut, pembimbing kemasyarakatan tetap dapat menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah Polres Bone secara Diversi dengan penerapan *Restorative Justice*.

B. Saran

1. Diharapkan agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani perkara Anak agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
2. Diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar proses Diversi dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan dari Diversi tersebut.
3. Diharapkan agar pihak korban dapat menerima kesepakatan Diversi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan penerapan *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta.*
- Bambang Poernomo. 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia. Jakarta.*
- Darwan Prinst. 2012. Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.*
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : Revika Aditama*
- M. Marwan & Jimmy P. 2009. Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition". Surabaya.*
- M. Nasir Djamil. 2012. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta Timur.*
- Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama.*
- Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta; Rajawali Pers*
- P.A.F dan Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.*
- R. Soesilo, 1998. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia.*

Roni Wiyanto.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bandung: Bina Cipta.

Rusli Effendi.1993. *Asas Hukum Pidana Bagian 2. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin*.

Setya Wahyudi. 2011. *Iplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta. Genta Publishing.

Wagiati Soetodjo.2005.*Hukum Pidana Anak*.Bandung.PT.Refika Aditama.

INTERNET

Andi Lesmana. *Definisi Anak*. Web. 5 Oktober 2016

Bapas Surakarta. *Sejarah Balai Pemasyarakatan*. 2013. 4 Juni 2014. Web.5 Oktober 2016.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.*Tugas dan Fungsi*. 2015. Web. 5 Oktober 2016.

Taufik Hidayat. *Peranan Bapas Dalam Perkara Anak*. 9 Februari 2008. 23 Oktober 2016

Undang – undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.